

Judul : Kurangi beban kota: PSEL bisa jadi solusi tumpukan sampah
Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kurangi Beban Kota PSEL Bisa Jadi Solusi Tumpukan Sampah

FOTO: DDC IG PRIBADI



Ateng Sutisna

ANGGOTA Komisi XII DPR Ateng Sutisna mendukung penetapan 10 wilayah sebagai fokus utama pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Program ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengatasi rumitnya persoalan sampah di perkotaan.

Ateng mengatakan, kebijakan PSEL itu jangan sampai berhenti di tataran seremonial saja. "Selain itu, pelaksanaan program ini jangan membebani Pemerintah Daerah tanpa dukungan nyata dari Pemerintah Pusat," jelasnya, kemarin.

Dia bilang, dalam kebijakan ini, setiap daerah diminta menyediakan lahan minimal lima hektare (ha) sebagai lokasi pengelolaan sampah. Daerah juga harus menjamin ketersediaan sedikitnya 1.000 ton sampah per hari agar program tersebut bisa berjalan optimal. "Itu adalah angka yang besar, sehingga perlu ada kolaborasi anggaran dan teknis dari Pusat," tegasnya.

Dia mengingatkan soal aspek transparansi anggaran dan keberlanjutan teknologi PSEL. Jangan sampai kebijakan ini justru jadi proyek mangkrak lainnya, seperti yang sebelumnya terjadi di beberapa daerah sebelumnya.

Anggota Komisi XII DPR Syafruddin menambahkan, saat ini teknologi yang dibutuhkan untuk PSEL sudah tersedia secara luas. Pemerin-

tah seharusnya mampu mempercepat implementasi solusi terkait masalah sampah. Langkah ini bisa dilaksanakan dalam waktu satu bulan.

Dia menilai, persoalan sampah telah menjadi isu darurat nasional yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Karena itu, percepatan program *waste-to-energy* bukan sekadar solusi teknis. "Program ini harus menjadi bagian dari kebijakan ketahanan energi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan," tegasnya.

Dia juga mengingatkan agar Pemerintah tidak terjebak dalam wacana atau perdebatan birokrasi yang tak kunjung selesai. Sebab, masyarakat saat ini membutuhkan tindakan nyata yang bisa langsung dirasakan, bukan sekadar janji-janji di atas kertas. "Potensi sampah kita besar, jika dikelola dengan benar justru bisa menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan menetapkan 10 wilayah prioritas pembangunan PSEL. Wilayah itu adalah Jakarta, Bali, DIY, Bekasi, Bogor Raya, Tangerang, Semarang Raya, Medan, serta beberapa daerah di Jawa Barat seperti Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia Hanif Faisol menjelaskan, pembangunan fasilitas PSEL adalah solusi konkret untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah di kota-kota besar. Sampah yang dihasilkan wilayah perkotaan mencapai 1.000 ton per hari. "Teknologi ini akan mengubah beban lingkungan menjadi sumber energi terbarukan yang bermanfaat bagi masyarakat," terang Hanif. ■ PVB